

## **Analisis *Framing* Pemberitaan Kisruh Partai Golkar Pasca Keputusan Menkumham Dalam Program Dialog Primetime News Metro TV Dan Kabar Petang TVOne**

Etika Widya Kusumadewi dan Farid Rusdi

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara  
tikkawidia@gmail.com ; farid@fikom.untar.ac.id

### ***Abstract***

*In the span of 2014 to 2015, the Golkar Party experienced a tumultuous duality of leadership between Aburizal Bakrie and Agung Laksono version. The Government through the Ministry of Justice and Human Rights issued a decree stating Golkar Party Agung Laksono version is a legitimate stewardship. Two national television news station, Metro TV and TVOne, which are both owned by political party leaders, also 'warm' to the conflict on both sides. This study aims to understand, analyze, describe and compare dialog program Primetime News Metro and Evening News TVOne in framing news Golkar chaotic post-issuance of a decree by the Minister of Justice and Human Rights. Data analysis techniques used in this research is the analysis method with the paradigm framing or constructionist approach. This study uses a model framing analytical approach by using categorization Murray Edelman. From the results of research show can be quite impartial Metro while TVOne are beyond reasonable limits. Both seemed to favor and do not promote objectivity. Media ownership is considered to impact content that do both.*

**Keywords:** *Framing, Television, Political Party, News*

### **Abstrak**

Pada rentang waktu 2014 hingga 2015 Partai Golkar mengalami kisruh dualisme kepemimpinan yakni Golkar Aburizal Bakrie versi Munas Bali dan Golkar Agung Laksono versi Munas Jakarta. Menkumham kemudian mengeluarkan SK yang semakin membuat panas tubuh partai. Dua media televisi nasional, Metro TV dan TVOne, yang keduanya dimiliki oleh pimpinan partai politik, turut 'menghangatkan' konflik kedua kubu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, mendeskripsikan serta menbandingkan program dialog Primetime News Metro TV dan Kabar Petang TVOne dalam membingkai pemberitaan kisruh partai Golkar pasca dikeluarkannya SK Menkumham yang isinya menyatakan Golkar Agung Laksono adalah kepengurusan yang sah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *framing* dengan paradigma atau pendekatan konstruksionis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *framing* model Murray Edelman dengan menggunakan kategorisasi. Dari hasil penelitian menunjukkan Metro TV dapat dikatakan cukup berimbang sedangkan TVOne berada diluar batas wajar. Dapat dilihat keduanya berpihak dan tidak mengedepankan objektivitas. Juga kepemilikan media dinilai memberi dampak terhadap isi pemberitaan yang dilakukan keduanya.

**Kata Kunci:** *Framing, Televisi, Partai Politik, Berita*

## Pendahuluan

Hasil yang mengecewakan Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum 2014 telah membuat partai berlambang beringin ini mengalami gejolak. Dimulai dari adanya manuver beberapa petinggi partai Golkar telah menginginkan Musyawarah Nasional hingga munculnya kepengurusan Golkar versi Agung Laksono dengan ketua umumnya.

Kekisruhan ini bertambah panas dengan adanya keputusan dari pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham. Pemerintah menetapkan bahwa kepengurusan Partai Golkar adalah versi Agung Laksono.

Peristiwa politik tersebut dapat menarik atensi media massa sebagai bahan liputan. Hal itu terjadi karena terdapat dua faktor yang saling berkaitan. Hamad (2004) menjabarkan dua faktor tersebut yakni, pertama politik kini berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*) dimana hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Terlebih para politisi berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya diliput oleh media. Nimmo (Hamad, 2004) menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa politik itu selalu laik berita. Tujuan komunikasi politik adalah pembentukan pendapat umum serta menjelaskan hubungan antara komunikasi politik dan opini publik.

Sementara itu dua stasiun televisi berita nasional di Indonesia, TVOne dan Metro TV gencar memberitakan kisruh Partai Golkar ini. Apalagi kedua stasiun TV ini dimiliki oleh Pimpinan Partai Politik, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di TVOne dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh di Metro TV. Penelitian ini tidak fokus pada motif kepentingan pemilik media, tapi mendeskripsikan bagaimana kedua media ini membingkai berita kisruh Partai Golkar melalui program dialog Primetime News Metro TV dan Kabar Petang TVOne.

Shoemaker dan Reese (1996) mengonsepsi lima faktor yang memengaruhi isi media, yakni level individu, rutinitas media, organisasi, *extra media*, dan ideologi. Tingkat pertama dalam hierarki pengaruh pada isi media adalah individu. Hal ini menyangkut sisi profesional jurnalis. Faktor yang melingkupi, antara lain adalah latar belakang pendidikan, perkembangan profesional dan keterampilan dalam menyampaikan berita secara tepat. Tingkat kedua adalah rutinitas media, hal ini berkaitan dengan perspektif organisasi media, aturan yang berlaku menyangkut proses penentuan berita atau bagaimana proses *gatekeeping*. Tingkat ketiga adalah organisasi, yakni faktor struktur organisasi media, bagaimana struktur dan proses pengambilan keputusannya, terutama terkait dengan hal di luar rutinitas. Tingkat keempat adalah *Extra Media*, yakni faktor di luar media, seperti narasumber berita yang mempunyai kepentingan tertentu, sumber penghasilan media dan lembaga-lembaga lain di luar media. Tingkat kelima adalah ideologi, yang diartikan sebagai kerangka-kerangka referensi yang terintegrasi, di mana masing-masing individu melihat realitas yang ada.

Media dengan kekuatannya juga mengindikasikan kepada publik apa yang menjadi isu utama hari ini dan hal yang tercermin dalam apa yang dipersepsikan publik sebagai isu utama, fenomena tersebut disebut dengan istilah "*agenda setting*" (McQuail: 2011). Dearing dan Rogers mendefinisikan proses ini sebagai "persaingan yang terus-menerus di antara isu-isu protagonis untuk mendapatkan perhatian dari pekerja media, publik, dan elit pembuat kebijakan. Lebih jauh lagi bergerak ke arah gagasan umum bahwa media mengarahkan perhatian dan membentuk kognisi,

mengarah pada penyelidikan kasus yang sebenarnya yang semakin tidak pasti apakah efek semacam itu benar-benar terjadi (McQuail: 2011). Media tidak saja tergantung pada berita kejadian (*news event*), tetapi ia memiliki tanggung jawab untuk menggiring orang melalui agenda-agenda yang bisa membuka pikiran (Cangara: 2011).

Menurut Goffman dikutip dalam Eriyanto (2002) *frame* adalah sebuah skema interpretasi, di mana gambaran dunia yang termilik seseorang diorganisasikan sehingga pengalaman tersebut menjadi punya arti dan bermakna. Eriyanto menjelaskan *frame* adalah sebuah prinsip dimana pengalaman dan realitas yang kompleks tersebut diorganisasi secara subjektif. *Frame* media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari dan akan menginformasikan ke dalam sebuah cerita.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana program dialog Primetime News Metro TV dan Kabar Petang TVOne dalam membingkai suatu pemberitaan, dengan konteks yang alamiah, penelitian ini akan menjabarkan temuan berupa uraian deskriptif.

Penelitian menggunakan analisis *framing* model Murray Edelman. Eriyanto (2002) menjelaskan bahwa model *framing* Murray Edelman mensejajarkan *framing* sebagai kategorisasi: pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran. Kategori membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Kategorisasi dalam mendefinisikan peristiwa menentukan bagaimana masalah didefinisikan, apa efek yang direncanakan, ruang lingkup masalah dan penyelesaian efektif yang direkomendasikan. Rubrikasi juga merupakan salah satu aspek kategorisasi penting dalam pemberitaan: bagaimana suatu peristiwa dikategorisasi dalam rubrik-rubrik tertentu. Rubrik menentukan bagaimana peristiwa dan fenomena harus dijelaskan.

## Hasil Penemuan dan Diskusi

### *Frame* Primetime News Metro TV 23 Maret 2015

Program dialog Primetime News menurunkan isu mengenai Golkar pasca dikeluarkannya SK Menkumham pada tanggal 23 Maret 2015 di paruh pertama dialog pada pukul 17:59:28 hingga pukul 18:40:39 dengan narasumber Yorrys Raweyai Wakil Ketua Umum partai Golkar (berdasarkan SK Menkumham) dan Maruarar Siahaan seorang Pakar Hukum Tata Negara. Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR tidak bisa bergabung dengan sambungan telepon sampai detik-detik terakhir. Ketidakbergabungan itu sudah di *declare* oleh presenter.

PRESENTER	: INDRA MAULANA
CG JUDUL	: GOLKAR VS KMP
CG SUBJUDUL	: PIMPINAN DPR CAMPURI URUSAN GOLKAR

Kategorisasi: Dalam pandangan Primetime News Metro TV, hak angket yang akan digulirkan oleh Golkar Aburizal Bakrie kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dianggap berlebihan. Hak angket hanya boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk golongan atau partai semata. Dasar yang dipakai untuk menguatkan hal tersebut yakni Undang-Undang MD3. Hal ini tampak dalam VO – SOT pembuka dialog berikut:

<p>CG : KUBU ICAL BISA GUGAT SK KE PTUN/ JAKARTA</p> <p>MENKUMHAM MENYATAKAN PIHAK YANG KECEWA BISA MENEMPUH JALUR HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAU P-T-U-N//TERKAIT RENCANA KUBU ABURIZAL YANG AKAN MENGGALANG HAK ANGKET ATAS PUTUSAN MENKUMHAM YASONNA MENJAWAB BAHWA SIKAP TERSEBUT BERLEBIHAN//</p>	
<p>CG : HAK ANGKET DINILAI BERLEBIHAN/JAKARTA</p> <p>BERDASARKAN UNDANG- UNDANG MD3 HAK ANGKET DILAKUKAN JIKA TERDAPAT KEPUTUSAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT LUAS/BUKAN TERKAIT KEPENTINGAN GOLONGAN//</p>	
<p>SOT : YASONNA LAOLY/ MENTERI HUKUM DAN HAM</p> <p>Sudah jelas walaupun ada beberapa pandangan berpendapat ada, ini dua kosong, ini <i>deadlock</i> tetapi ternyata dari kajian kami, kami mempertanggungjawabkan itu. Itu bukan <i>deadlock</i>, ada satu keputusan dua orang membuat rekomendasi dan rekomendasi itu adalah amar keputusan. Ternyata terakhir Professor Muladi yang salah satu dari hakim mahkamah partai juga mengatakan bahwa benar itulah keputusan amar keputusannya.</p>	

Tema besar yang diangkat oleh Metro TV dalam dalam program dialog 23 Maret 2015 mengenai Golkar dan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal tersebut tersurat dalam CG yang ditampilkan yakni Golkar VS KMP. Akronim VS (versus) dalam kbbi.web.id mempunyai arti (me)lawan (dipakai dalam pertandingan olahraga, dalam perselisihan hukum di pengadilan, dalam perdebatan, dsb). Golkar dibawah Agung

Laksono berniat melawan KMP dan akan keluar dari KMP, seperti yang diketahui bahwa Golkar pada pemilihan presiden 2014 lalu Golkar merupakan barisan KMP. “Pimpinan DPR Campuri urusan Golkar”. DPR dianggap tidak dapat bekerjasama terkait kepengurusan baru fraksi Golkar yang diketuai oleh Agus Gumiwang. Perombakan fraksi di DPR tidak disetujui dengan dalih bahwa belum adanya keputusan inkrah partai Golkar.

#### CG : PIMPINAN DPR CAMPURI URUSAN GOLKAR

##### LEAD DIALOG

KUBU AGUNG LAKSONO KINI DINILAI DAPAT DENGAN LELUASA MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENJALANKAN RODA ORGANISASI PARTAI GOLKAR/ TERMASUK SOAL URUSAN FRAKSI DI PARLEMEN/ NAMUN PIMPINAN DPR MENGAKU BELUM DAPAT MENGABULKAN PERMINTAAN PEROMBAKAN FRAKSI/ KARENA BELUM ADA KEPUTUSAN PENGADILAN YANG INKRAH// KAMI AKAN MENGULASNYA KALI INI DENGAN WAKIL KETUA UMUM PARTAI GOLKAR YORRYS RAWEYAI/ SELAMAT MALAM BANG YORRYS/ ADA JUGA PAKAR HUKUM TATA NEGARA MARUARAR SIAHAAN / DAN BERGABUNG MELALUI SAMBUNGAN TELEPON ADA DARI PAK WAKIL KETUA DPR PAK TAUFIK KURNIAWAN/ KITA AKAN NANTI MENGHUBUNGI PAK TAUFIK KURNIAWAN LEBIH LANJUT// TAPI SAYA AKAN MEMULAI DENGAN BANG YORRYS/ TADI SUDAH KITA LIHAT PAK AGUS GUMIWANG SUDAH MULAI MENDEKLARASIKAN DIRI BEGITU SEBAGAI KETUA FRAKSI YANG SAH SEKALIGUS PIMPINAN FRAKSI GOLKAR YANG SAH DI PARIPURNA BEGITU/ TETAPI KITA TAHU JUGA BAHWA PIMPINAN DPR MASIH BELUM DISEBUT MENGAKUI ATAUPUN MENGESAHKAN ATAU MENGABULKAN RENCANA DARI PEROMBAKAN FRAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI GOLKAR



DIBAWAH PAK AGUNG LAKSONO  
INI/BAGAIMANA ANDA ADA//

SK Menkumham dianggap telah sah karena sesuai dengan hasil mahkamah partai Golkar. Metro TV mempertanyakan mengapa SK yang sudah sah tersebut masih dianggap tidak inkrah oleh pihak lain.

**INDRA MAULANA**

SAYA INGIN MINTA PENJELASAN LAGI DARI PAKAR HUKUM TATA NEGARA PAK MARU/PAK MARU/SAYA INGIN TAHU JELAS KARENA MEREKA MENUNAKAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG KATANYA HARUS PUTUSAN PENGADILAN YANG INKRAH AGAR BISA PIMPINAN DEWAN ITU MENGABULKAN PERMINTAAN PEROMBAKAN FRAKSI/ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN SEBAGAINYA/NAH KALAU DARI SATU SISI MENGATAKAN MAHKAMAH PARTAI INI SUDAH PUTUSAN FINAL MENGIKAT ARTINYA INKRAH DISITU/TAPI DI SISI MEREKA MENGATAKAN MASIH SAYA AJUKAN KE P-T-U-N/MASIH ADA PROSES BELUM LAGI PTUN MISALNYA SAMPAI DENGAN KASASI KAN MASIH PANJANG PROSESNYA / PEGERTIAN DARI INKRAH INI SEPERTI APA//



**Tabel 1.** Pola Kategorisasi Primetime News Metro TV 23 Maret 2015

<b>Pihak Kita</b>	<b>Pihak Mereka</b>
Golkar Agung Laksono	DPR
Patuh hukum	Membangkang

**Frame Primetime News Metro TV 24 Maret 2015:**

Primetime News menurunkan isu Golkar pada 24 Maret 2015 di paruh kedua dialog, yakni pada pukul 18:48:16 hingga pukul 19:19:20 WIB. Narasumber dihadirkan yakni Sekretaris parrtai PKS Refrizal dan Ketua DPP partai Golkar (Agung Laksono) Agun Gunanjar.

PRESENTER : INDRA MAULANA  
CG JUDUL : LEWAT ANGKET KMP MELAWAN  
CG SUB JUDUL : ELIT KMP PAKSAKAN HAK ANGKET



Pasca dikeluarkannya SK Menkumham, Golkar dibawah Aburizal Bakrie yang berada di barisan KMP segera melakukan mengajukan hak angket karena dianggap keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak sesuai dengan hasil mahkamah partai.

Metro TV tetap menganggap bahwa pengajuan hak angket terhadap Yasonna Laoly adalah keputusan yang berlebihan. Hak angket merupakan hak yang bisa digunakan untuk urusan publik dan bukan untuk kepentingan partai politik. *Public interest* seperti yang dikutip dari pengamat politik Gun Gun Heryanto dianggap tidak sesuai jika untuk segelintir parpol. Media akan menggunakan mulut orang lain (*sound bite*) untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai konteks.

<p>CG : ANGKET UNTUK URUSAN PUBLIK / JAKARTA</p> <p>NAMUN LANGKAH DPR MENGGULIRKAN HAK ANGKET TERKAIT PERSOALAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENDAPAT KRITIKAN DARI PENGAMAT POLITIK GUN- GUN HERYANTO/ YANG MENYEBUT HARUSNYA HAK ANGKET DIGUNAKAN UNTUK MENYELIDIKI ADANYA PELANGGARAN TERKAIT KEBIJAKAN YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PUBLIK YANG LEBIH LUAS//</p>	
<p>SOT : GUN GUN HERYANTO/ PENGAMAT POLITIK</p> <p>Hanya masalahnya adalah logikanya menurut saya belum ajeg diterima di ruang publik. Seberapa besar misalnya hal yang elementernya atau hal yang mendasarnya hak agket itu untuk menjawab sebuah kisruh internal partai. Hak angket itu kan hak yang melekat pada dewan yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan publik atau <i>public interest</i> contohnya misalnya kalau kita lihat konstruksi makna kalau hak penyelidikan atau investigasi terhadap kebijakan strategis yang patut diduga itu melakukan pelanggaran perundang- undangan kan gitu. Masalahnya adalah seberapa tersedia yang disebut <i>public interest</i> dalam kasus ini sehingga mungkinkah</p>	

hak angket itu bergulir hanya untuk kepentingan segelintir elit parpol yang merasa kecewa di internal atau untuk publik sehingga kemudian wajar kalau banyak orang bertanya seberapa *urgent* hak angket ini untuk publik.

KMP menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan intervensi. Hak angket digunakan anggota dewan untuk meminta penjelasan dan investigasi SK yang telah dikeluarkan. Metro TV berpandangan bahwa kisruh Golkar ini dan keputusan Menkumham Yasonna Laoly merupakan urusan internal partai Golkar dan KMP tidak perlu ikut terlibat.

CG : LEWAT ANGKET KMP MELAWAN

#### LEAD DIALOG

KOALISI MERAH PUTIH KINI KEMBALI MERAPATKAN BARISAN DAN MENGULIRKAN HAK ANGKET TERKAIT PUTUSAN MENKUMHAM TENTANG GOLKAR DAN PPP /DINILAI KECEWA ATAS DUGAAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM HAL KONFLIK INTERNAL PARTAI TERSEBUT FRAKSI YANG TERGABUNG DI KMP JUGA AKAN MENGEMBALIKAN PENCALONAN KOMJEN BADRODIN HAITI OLEH PRESIDEN JOKOWI SEBAGAI KAPOLRI// KAMI AKAN MEMBAHASNYA KALI INI DENGAN KETUA DPP PARTAI GOLKAR/ ANGGOTA DPR RI AGUS GUNANJAR/ YANG TERGABUNG DI LUAR STUDIO/ SELAMAT MALAM PAK AGUNG/ BAIK DAN JUGA ADA SEKRETARIS PARTAI PKS PAK REFRIZAL/ SELAMAT MALAM PAK REFRIZAL/ BAIK / SAYA MULAI DENGAN KE PAK REFRIZAL TERLEBIH DAHULU/ PAK REFRIZAL DARI HASIL RAPAT TERTUTUP PETINGGI – PETINGGI FRAKSI DARI KOALISI MERAH PUTIH TADI ADALAH SEPAKAT UNTUK MENGULIRKAN HAK ANGKET TERKAIT DENGAN LANGKAH ATAU KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM TERKAIT GOLKAR DAN JUGA PPP/ PERTANYAAN KAMI INI KMP KENAPA MENJADI IKUT- IKUTAN PAK SOAL INTERNAL PARTAI / INI KAN URUSAN INTERNAL GOLKAR DAN PPP SEBENARNYA//





KMP dianggap ikut campur terhadap urusan internal Golkar.

<p><b>INDRA MAULANA</b>  YA TETAPI KALAU KITA  LIHAT/DENGAR DARI PERNYATAAN  YANG DISAMPAIKAN PAK ABDUL  HAKIM SENDIRI DARI PKS/ JUGA  MENYATAKAN BAHWA FRAKSI PKS  JUGA SEPAKAT DENGAN TEMAN-  TEMAN KMP UNTUK MENGGULIRKAN  HAK ANGKET/ ITU KATA YANG  DISAMPAIKAN PAK/ BERARTI INI  MENYERET- NYERET KMPNYA//</p>	
<p><b>REFRIZAL/ SEKRETARIS FRAKSI PKS</b>  Ya betul.</p>	
<p><b>INDRA MAULANA</b>  TERKAIT DENGAN APA NAMANYA DI  YANG DILAKUKAN OLEH YASONNA  LAOLY MENTERI HUKUM DAN HAM//</p>	
<p><b>REFRIZAL/ SEKRETARIS FRAKSI PKS</b>  Tapi nanti dikembalikan kepada anggotanya  ya. Nanti dikembalikan kepada anggotanya  ya. Yang mempunyai hak angket itu.</p>	

KMP dinilai terlalu jauh dalam mengambil tindakan. Putusan presidium KMP tidak hanya menggulirkan hak angket tetapi juga mengancam pengembalian pencalonan Badrodin Haiti.

<p><b>INDRA MAULANA</b> BAIK/ KEMBALI KE ANGGOTA / TETAPI KENAPA INI ADA RAPAT DARI KHUSUS KMP SAJA BEGITU YANG TERTUTUP SEPERTI HARI INI/ YANG DISEBUTKAN JUGA OLEH PAK ADE KOMARUDIN BAHWA INI ADALAH LANJUTAN DARI PUTUSAN PRESIDIUM KMP YANG MENUANGKAN TIGA KEPUTUSAN TERKAIT MENGGULIRKAN HAK ANGKET /DAN DIANTARANYA NANTI MENCABUT SURAT ATAU MENGEMBALIKAN SURAT PENCALONAN KOMJEN BADRODIN HAITI SEBAGAI KAPOLRI BEGITU/ ARTINYA INI MULAI MASUK KEPADA RANAH INTERNAL DARI PARTAI GOLKAR DAN PPP SENDIRI//</p>	
---	--

Rapat tertutup KMP di mana Golkar dibawah Aburizal Bakrie ikut didalamnya dianggap ilegal karena kepengurusan yang sah sudah dipegang oleh Agung Laksono. Sehingga tidak boleh adanya surat menyurat yang mengatasnamakan partai Golkar juga tanpa persetujuan dan tanda tangan Agus Gumiwang atau elit lainnya dibawah Agung Laksono.

<p><b>INDRA MAULANA</b> KALAU ADA YANG MENGGUNAKAN ATRIBUT GOLKAR / SEPENGETAHUAN DARI FRAKSI YANG RESMI/ APA YANG RESIKO ATAU APA YANG DIKENAKAN KEPADA MEREKA ATRIBUT GOLKAR/ KITA AKAN</p>	
<p><b>INDRA MAULANA</b> KITA SUDAH MENDENGAR TADI PERNYATAA DARI KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR/ AGUS GUMIWANG MENYATAKAN BAHWA TIDAK BOLEH/ TIDAK ADA LAGI ORANG LAIN YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI GOLKAR TERUTAMA TERKAIT DENGAN SURAT MENYURAT JIKA TANPA PERSETUJUAN DARI FRAKSINYA ATAU TANDA TANGAN DARI AGUS GUMIWANG ATAU JUGA ELIT YANG LAIN YA MASUK DALAM KEPENGURUSAN FRAKSI TERSEBUT/ TAPI YANG INGIN SAYA TAYAKAN KE</p>	

<p>PAK REFRIZAL SEKARANG/ PAK REFRIZAL TADI ADA JUGA DARI FRAKSI GOLKAR BEGITU YANG IKUT DALAM MELAKUKAN PERSETUJUAN TERKAIT DENGAN MENGGULIRKAN HAK ANGKET INI / PADAHAL KITA TAHU FRAKSI PARTAI GOLKAR BERADA DI TANGAN AGUS GUMIWANG SEKARANG SESUAI SK DARI KEMENKUMHAM ITU/ KIRA-KIRA BAGAIMANA KEMUDIAN INI DINYATAKAN ILEGAL OLEH</p>	
<p><b>INDRA MAULANA</b> TAPI KALAU YANG DISEBUTKAN PAK AGUN TADI ITU ADALAH BERLEBIHAN MISALNYA MENGGUNAKAN HAK ANGKET ITU/ PAK REFRIZAL//</p>	

**Tabel 2.** Pola Kategorisasi Primetime News Metro TV 24 Maret 2015




<b>Pihak Kita</b>	<b>Pihak Mereka</b>
Golkar Agung Laksono Patuh hukum	Koalisi Merah Putih/ Golkar Aburizal Bakrie Melawan hukum/ berlebihan/ ilegal

### **Frame Kabar Petang TVOne 24 Maret 2015**

Kabar Petang TVOne menurunkan isu bahwa pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengintervensi partai Golkar dengan mengeluarkan SK Menkumham. SK Menkumham yang disebut berdasarkan hasil mahkamah partai dianggap tidak sesuai. Hanya dua dari empat hakim mahkamah partai yang menganggap Golkar dibawah Agung Laksono yang sah. SK tersebut juga menuai kritikan. Dianggap dapat menciderai asas demokrasi berbangsa dan bernegara. Yasonna Laoly juga dianggapn sewenang-wenang dalam mengutus sengketa partai Golkar.

PRESENTER : ARYO WIDIARDI DAN DWI ANGGIA  
 PRESENTER DIALOG LIVE DPR : MUHAMMAD RIZKY  
 CG JUDUL : DEMOKRASI DALAM BAHAYA

Dialog ini menghadirkan anggota fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana dan Sekretaris fraksi partai Gokar Bambang Soesatyo, dengan durasi dialog 16: 13 :52 hingga 18 : 55 : 49.

<p><b>LEAD PKG</b> PARTAI POLITIK YANG BERADA DALAM KOALISI MERAH PUTIH SERIUS MENGGALANG DUKUNGAN HAK ANGKET UNTUK MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY/ KEPUTUSAN MENTERI TERKAIT SENGKETA PARPOL DINILAI TERLALU JAUH DAN DIANGGAP BISA MEMBAHAYAKAN IKLIM DEMOKRASI//</p>	
<p><b>CG : KMP GULIRKAN HAK ANGKET UNTUK MENKUMHAM</b> <b>ROLL PKG</b> KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM / YANG MENGESAHKAN PARTAI GOLKAR KEPENGURUSAN AGUNG LAKSONO DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN VERSI ROMAHURMUZIY MEMBUAT KOALISI MERAH PUTIH MENDORONG HAK ANGKET// HAK ANGKET ITU DIUSULKAN SETELAH MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY/ DINILAI SEWENANG- WENANG DALAM MENGUTUSKAN SENGKETA PARTAI GOLKAR DAN PPP//</p>	 

Kabar Petang TVOne menganggap bahwa keputusan yang dibuat Menkumham merupakan bentuk intervensi terhadap kisruh partai Golkar. Tidak adanya putusan mahkamah buatkan berarti Menkumham dapat mengeluarkan SK. SK dianggap cacat hukum, seperti cuplikan yang ada dalam paket berita ini:

<p><b>CG : PUTUSAN MENKUMHAM DIANGGAP SEWENANG- WENANG/ JAKARTA</b> SEMENTARA ITU FRAKSI GERINDRA MENDUKUNG PENUH HAK ANGKET KARENA MENILAI BAHWA KEPUTUSAN MENKUMHAM ADALAH INTERVENSI TERHADAP PARTAI POLITIK//</p>	
---	--

Penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi isu yang dikeluarkan Kabar Petang TVOne. Yasonna sebagai Menteri dianggap menggunakan jabatannya untuk mengoalkan kepentingan.



**SEDANGKAN FRAKSI PKS MENILAI  
YASONNA LAOLY  
MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN//**



Dengan dikeluarkannya SK Menkumham, demokrasi di Indonesia dianggap tercederai. Demokrasi partai politik tidak lagi akan “bebas”.

**KEPUTUSAN MENKUMHAM DALAM  
MENANGANI SENGKETA PARTAI  
POLITIK DINILAI SEBAGAI BENTUK  
CERMINAN INTERVENSI PEMERINTAH  
YANG DIKHAWATIRKAN AKAN  
MEMBAHAYAKAN IKLIM DEMOKRASI  
DITANAH AIR///**



Terdapat perbedaan landasan dalam mengambil keputusan terkait sengketa partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Golkar menggunakan pijakan mahkamah partai sedangkan PPP tidak menggunakan pijakan yang sama. Hal tersebut memunculkan kecurigaan TVOne mengenai landasan apa yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa partai politik.

**MUHAMMAD RIZKY  
SEKALI LAGI INI BUKAN HANYA  
GOLKAR/ PPP PUN DISAMPAIKAN  
BAMBANG/ BERPIJAKNYA PADA  
MAHKAMAH PARTAI TAPI PPP TIDAK  
MENGUNAKAN MAHKAMAH  
PARTAI//**



Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga dianggap oleh TVOne sebagai aktor yang mendapat tekanan kuat dibelakangnya. Nuansa politik yang kuat menjadi tanda terciurnya tudingan tersebut. Kabar Petang kemudian mengembangkan pertanyaan mengenai tekanan tersebut yang tujuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai yang mengusung Yasonna dan partai yang berkuasa di eksekutif saat ini.



<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> KALAU NUANSA POLITIK KUAT KIRA-KIRA PAK MENTERI HUKUM DAN HAM ITU PAK YASONNA LAOLY TEKANAN SIAPA PROF //</p>	
<p><b>TJIPTA LESMANA / PAKAR KOMUNIKASI POLITIK</b> Ya tekanan siapa, saya kira yang paling tepat menjawab itu temen saya yang ada di kanan saya. Saya kira.</p>	
<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> KENAPA/ COBA- COBA/ PROF HENDRAWAN ADA TEKANAN //</p>	
<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> KALAU AGENDA POLITIK BERARTI BALIK LAGI/ AGENDA POLITIK/ MENTERINYA DARI PARTAI POLITIK/ MENTERI DARI PARTAI POLITIK AGENDA POLITIK TENTU TIDAK BISA DIHINDARI MEMBAWA AGENDA POLITIK PARTAINYA/ BAGAIMNA APROF HENDRAWAN MENJAWAB INI/ TAPI KITA HARUS JEDA DULU SEJENAK/ KITA KEMBALI SESAAT LAGI//</p>	
<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> SAYA AKAN LANJUTKAN PERBINCANGAN DI KABAR PETANG SORE HARI INI/ PROF HENDRAWAN DULU/ TADI AGENDA POLITIK TENTU ADA AGENDA- AGENDA YANG DIBAWA MENTERI HUKUM DAN HAM KEMUDIAN DARI PDI PERJUANGAN / KEMUDIAN ADA AGENDA DARI PDI PERJUANAGAN//</p>	

Menteri Hukum dan HAM selalu dinilai sewenang-wenang dalam mengambil keputusan melalui SK Menkumham yang mensahkan Golkar Agung Laksono.

<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> BUKAN- BUKAN KEMUDIAN MENTERI HUKUM DAN HAM MEMBERI KEPUTUSAN//</p>	
--	--

Kabar Petang dalam hal ini diwakili oleh presenter meminta pembenaran atas konstalasi politik Menkumham serta agenda politik yang dibawahnya. Pertanyaan tersebut diajukan bukan tanpa alasan. Kabar Petang ingin khalayak mengetahui lewat mulut Tjipta Lesmana pembenaran tersebut.

<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> TAPI KAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN APA- APA/ TIDAK PERNAH MELAKUKAN BOIKOT.</p>	
<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> PROF TJIPTA SESUNGGUHNYA APA SIH/ KONSTALASI POLITIK TADI ADA AGENDA POLITIK/ TUDINGANNYA KAN SEPERTI ITU/ APA BENAR ITU MENKUMHAM ADA AGENDA POLITIK/</p>	
<p><b>MUHAMMAD RIZKY</b> JADI SEBENARNYA KALAU MENDENGAR PENJELASAN PROF TJIPTA/ BERARTI MEMANG BETUL APA YANG DIKATAKAN/ DIKUTIP FADLI ZON BAHWA INI MERUPAKAN OPERATOR POLITIK PAK YASONA LAOLY//</p>	

<b>BAMBANG SOESATYO/ SEKRETARIS FRAKSI PARTAI GOLKAR</b> SK sudah keluar bos.	
<b>HENDRAWAN SUPRATIKNO/ ANGGOTA FRAKSI PDIP</b> Juru- juru rundig inikan tanggal 3 sampai tanggal 10 kemaren kan.	
<b>MUHAMMAD RIZKY</b> SEKARANG- SEKARANG/ KITA BERBICARA SEKARANG TIDAK ADA MAKA HAK ANGKET DIGULIRKAN//	

**Tabel 3.** Pola Kategorisasi Kabar Patang TVOne 24 Maret 2015

Pihak Kita	Pihak Mereka
Golkar Aburizal Bakrie/ DPR/ KMP	Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/ Golkar Agung Laksono/ PDI Perjuangan
Meminta keadilan	Membahayakan demokrasi

### Perbandingan Media Berdasarkan Teori Murray Edelman

**Tabel 4.** Perbandingan *Frame* Berdasarkan Teori Murray Edelman

Elemen	Primetime News Metro TV	Kabar Petang TVOne
<b>Frame</b>	KMP intervensi Golkar	Menkumham intervensi Golkar
<b>Pihak kita</b>	Golkar Agung Laksono	Golkar Aburizal Bakrie
<b>Pihak mereka</b>	Koalisi Merah Putih/ Golkar Aburizal Bakrie	Menkumham/ PDI Perjuangan

**Tabel 5.** Perbandingan isu yang dipakai Primetime News Metro TV dan Kabar Petang TVOne

Metro TV	TVOne
SK menkumham dinilai tepat dan sudah mengikat.	SK Menkumham dinilai tidak sesuai dengan hasil mahkamah partai Golkar. Karena hanya dua dari empat hakim mahkamah partai Golkar yang menganggap Munas Bali tidak sah karena dinilai tidak demokrasi.

---

KMP intervensi Golkar. KMP mengajukan hak angket untuk mengetahui dan menginvestigasi SK Menkumham.	Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly intervensi sengketa Golkar.
Hak angket dinilai berlebihan.	Yasonna Laoly membawa agenda partai. Yasonna Laoly menyalahgunakan kekuasaan.

---

Primetime News Metro TV tentu pemberitaannya dipengaruhi oleh kebijakan redaksi. Bagaimana cara pandang redaksi menentukan konstruksi realitas. Metro TV yang merupakan kepemilikan Surya Paloh, seorang politisi partai Nasdem pendukung pemerintah yang juga bersebrangan dengan KMP. Dapat dilihat secara garis transparan mendukung Golkar Agung Laksono yang dengan jelas akan keluar dari barisan KMP.

Sebaliknya dengan TVOne, Aburizal Bakrie yang merupakan pemilik media tersebut dianggap masih menjabat sebagai Ketua Partai Golkar hingga 2019 hasil munas Bali.

Narasumber merupakan elemen penting dalam suatu program dialog. Narasumber bisa menrepresentasikan suatu program. Pro dan kontra menjadi ciri khas program dialog sehingga keredaksian juga harus memilah – milah siapa yang akan dijadikan narasumber pada programnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Produser Eksekutif Primetime News Metro TV, Jati Savitri Sekargati.

“Karena dalam penentuan narasumber di *talkshow* kita harus tahu peran mereka sebagai apa. Kita mau tempatin mereka di posisi pro dan kontra. Jadi harus tahu bagaimana sikap mereka terhadap satu isu atau topik).”

## Simpulan

Kondisi media yang partisan dan loyal pada pemilik modal (bukan pada warga) bisa menjadikan media menjelma sebagai alat tunggangan politik dan mesin propaganda yang gigih. Dari hasil analisis *framing* dua program dialog, Primetime News dan Kabar Petang TVOne terkait kisruh partai Golkar pasca dikeluarkannya SK Menkumham yang ditemukan adalah perbedaan kedua media dalam melihat satu kasus yang sama.

Dalam penelitian ini, tergambar bahwa memang tidak ada media yang benar-benar netral dalam menuliskan sebuah berita, banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memberitakan suatu peristiwa terkait kasus yang melibatkan elit politik partai. Tidak ada media yang netral dalam menuliskan suatu berita. Primetime News Metro TV lebih berada di garis belakang Golkar Agung Laksono. Kabar Petang TVOne pemberitaannya cenderung menyalahkan pemerintah melalui Menkumham yang telah mengeluarkan SK Menkumham.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian hingga dipublikasikan, terutama kepada pihak redaksi Metro TV yang telah menjadi narasumber.

### **Daftar Pustaka**

- Cangara, Hafied. (2011). *Komunikasi politik: konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. (2002). *Analisi framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Jakarta: Granit
- McQuail, Denis. (2011). *Teori komunikasi massa edisi 6 buku 2*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Shoemaker and Reese, (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, Second Edition. Longman,. New York.